



# Pemkot Dapat DID Rp 57 M

**Daerah Peraih WTP 2017**

- ▶ Pemprov Kalbar
- ▶ Kota Pontianak
- ▶ Kubu Raya
- ▶ Mempawah
- ▶ Singkawang
- ▶ Sanggau
- ▶ Landak
- ▶ Sekadau
- ▶ Ketapang
- ▶ Sintang
- ▶ Kapuas Hulu

**Dana Insentif Daerah (DID)**

Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi, kabupaten, dan kota dengan kriteria

- 
- Mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal
- 
- Pengelolaan keuangan daerah
- 
- Pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
- 
- Pelayanan pemerintahan umum
- 
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat

IST

**PIAGAM** - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerima piagam yang ditandatangani Menkeu RI yang diserahkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (13/12).



## ■ Tujuh Kali Raih Predikat WTP



**Memang masih ada temuan, namun sifatnya administrasi dan tidak signifikan. Umumnya berkaitan dengan aturan dan nomenklatur yang harus disesuaikan.**

**Edi R Kamtono**  
Wali Kota Pontianak

**PONTIANAK, TRIBUN** - Potensi pendapatan pada APBD Kota Pontianak tahun 2019 bakal bertambah. Pemkot Pontianak akan menerima Dana Intensif Daerah (DID) dari pusat sebesar Rp 57 miliar. DED diberikan sebagai reward atas tujuh kali raihan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK RI) atas laporan keuangan daerah.

Kali ini, Wali Kota Pontianak, Edi R Kamtono yang menerima Piagam Penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun 2017. Piagam ditandatangani langsung Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani tersebut diserahkan langsung Guber-

nur Kalbar Sutramidji di Balai Petiti, Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kamis (13/12).

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali mampu mempertahankan predikat

■ Bersambung ke hal. 11

### Tujuan DID

Untuk mendorong agar pemerintah daerah dapat meningkatkan:

- ▶ Tata kelola keuangan daerah
- ▶ Kualitas kesehatan fiskal pengelolaan keuangan daerah
- ▶ Kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
- ▶ Kualitas pelayanan pemerintahan umum
- ▶ Kesejahteraan masyarakat
- ▶ Kemudahan berusaha di daerah

### Kriteria DID

- ▶ Kenaikan predikat penghargaan Ketepatan waktu pelaporan
- ▶ Tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional
- ▶ Laju pertumbuhan ekonomi
- ▶ Pengendalian laju inflasi

Sumber: Kemenkeu RI GRAFIK: ENRO

**Besaran DID didapat Kota Pontianak**

Berkisar

**Rp 57 miliar**

Besaran DID ditentukan pemerintah pusat melalui kementerian keuangan



opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Predikat WTP ini merupakan yang ketujuh kalinya diterima secara berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pemkot Pontianak berhasil meraih penghargaan tertinggi di bidang pengelolaan anggaran pemerintah daerah karena dinilai mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangannya. Kota Pontianak meraih WTP 2017 bersama sembilan daerah tingkat dua lainnya termasuk Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri.

Berikut pemerintah daerah yang menerima penghargaan WTP atas laporan keuangan daerah 2017. Pemprov Kalbar, Kota Pontianak, Kutu Raya, Mempawah, Singkawang, Sanggau, Landak, Sekadau, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu.

Hanya sebagian kecil daerah tak mendapat WTP atas laporan keuangan 2017 lalu, dari 14 Pemerintah Daerah Tingkat II se-Kalbar.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menuturkan WTP sudah tujuh kali pihaknya terima. Memang setiap tahunnya terus mengejar WTP dengan penggunaan anggaran yang transparan dan membuat laporan sebaik mungkin.

"Kalau Kota Pontianak ini merupakan WTP ketujuh kalinya. Kita terus tingkatkan laporan keuangan, jangan sampai ada penyimpangan dan membuat semuanya transparan," ucap Edi Kamtono.

Dikatakan Edi, raihannya WTP bukan hanya sekedar mendapatkan piagam, tapi pemerintah pusat akan memberikan insentif terhadap prestasi yang diraih daerah. Edi bersyukur dengan mendapat predikat WTP,

Pemkot Pontianak diganjar pula dengan insentif dari pemerintah pusat yang nilainya cukup besar.

"Kita akan terus tingkatkan kualitas WTP nya supaya harapan kita mendapat insentif. Tahun ini total insentif kita dapat Rp 57 miliar. Tidak hanya karena WTP, tapi karena APBD tepat waktu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) nilainya baik, pelayanan kesehatan baik dan lainnya," jelas Edi Rusdi Kamtono.

Tentunya dengan memperoleh insentif sebesar Rp57 miliar tersebut menambah APBD Kota Pontianak untuk membangun daerahnya.

Meskipun meraih WTP, bukan berarti temuan-temuan terkait laporan penggunaan APBD tidak ada temuan.

Temuan yang ada disebutkannya, bersifat administrasi dan tidak merugikan negara. Kemudian dapat diselesaikan setelah direkomendasikan oleh BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan daerah.

"Memang masih ada temuan, namun sifatnya administrasi dan tidak signifikan. Umumnya berkaitan dengan aturan dan nomenklatur yang harus disesuaikan," jelasnya Edi Kamtono.

### Ingatkan Pungli

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan ucapan selamat pada daerah yang meraih predikat WTP atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2017.

Saat menyerahkan Piagam WTP dari Kemenkeu RI, Midji mengingatkan para kepala daerah se Kalbar yang hadir serta jajaran kepala dinas provinsi, agar berhati-hatilah dalam penggunaan anggaran, jangan sampai menyimpang dan merugikan keuangan negara.

"Saya ingatkan kawan-kawan kepala daerah dan para kepala dinas di Pemerintah

Provinsi Kalbar, berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Jangan main-main terhadap penggunanya," ucap Midji dalam sambutannya.

Midji mengaku telah mengumumkan pada masyarakat dan media, apabila ada di jajaran pemerintah provinsi yang melakukan pungli sekecil apapun. Ia pun tak segan akan melaporkannya ke penegak hukum.

"Saya pastikan para pegawai tak hanya diawasi oleh inspektorat saja, tapi lebih dari itu. Laporan-laporan sudah ada yang masuk dengan saya," tambah Midji.

Ia berharap bagi daerah yang belum WTP tahun berikutnya dapat meraih WTP dengan penggunaan anggaran sebaik-baiknya.

Khusus Melawi, mantan Wali Kota Pontianak ini berharap tahun depan ketika APBD 2019 diaudit dapat meraih WTP. "WTP itu merupakan sebuah kinerja yang luar biasa, dan Bengkayang Insyaallah saya rasa bisa memperoleh WTP. Begitu juga untuk Sambas. Bahkan tahun depan saya rasa Sambas bisa mem-

peroleh WTP," imbuhnya.

Midji mengungkapkan ada di lingkungan pemerintah provinsi yang menarik uang jasa saat memberikan SK berkala pada pegawainya. "Masa mengambil SK berkala saja harus ada uang jasanya. Saya sebutkan saja dinas yaitu Dinas Pendidikan. Itu benar atau tidak tapi ada laporan pada saya," tukasnya.

Hal tersebut dinilai Midji sangat luar biasa dan di luar etika yang ada, urusan yang seharusnya tidak berbayar tapi ditarik uang jasanya. "Saya tidak mau lagi dengar laporan itu masuk. Kalau masih terjadi, saya pastikan akan serahkan oknum tersebut pada penegak hukum atau Tim Saber Pungli," tegasnya.

Kembali diingatkannya untuk jajaran provinsi, kalau di dalam LHP banyak temuan kemudian laporan keuangan tidak tepat waktu, ia pastikan akan menggantikan kepala dinas yang bersangkutan. "Karena sudah ada kontrak kerja dan itu harus diambil agar kinerja jajaran Pemprov Kalbar lebih baik," pungkasnya. (oni)